

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Polda Jateng dan mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Polda Jateng.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Polda Jateng dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan dan teori kemanfaatan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada saat kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan melihat ketentuan pidana Pasal 127 ayat (2) dan (3), sehingga ada konsistensi untuk memperhatikan Pasal-Pasal yang mengatur ketentuan rehabilitasi sehingga nantinya para pecandu dan korban penyalah guna narkoba dapat di rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Melihat ketentuan pidana Pasal 127 ayat (2) dan (3), dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara yang disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) diwajibkan untuk memperhatikan Pasal-Pasal yang mengatur ketentuan rehabilitasi sehingga nantinya para pecandu dan korban penyalah guna narkoba dapat di rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan tidak lagi dipidana penjara maupun pidana kurungan karena rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Hambatan-hambatan yang berasal dari pemerintah ini oleh disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) hambatan, yaitu: a) Belum ada ditetapkannya tempat khusus bagi para pecandu maupun korban-korban penyalah guna narkoba untuk melakukan rehabilitasi, b) Masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkoba, c) Belum ada panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah, d) Terjadinya perbedaan keterangan antara terdakwa, saksi dan hasil laboratorium kriminalistik. e) Terjadi masalah eksekusi. Adapun solusi atas kendala yang ada adalah : a) Penyediaan tempat khusus bagi para pecandu maupun korban-korban penyalah guna narkoba untuk melakukan rehabilitasi, b) Pemberian subsidi untuk memperingan biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkoba, c) Mempermudah pengguna narkoba untuk melakukan rehabilitasi di panti rehabilitasi, d) Peningkatan sumberdaya pada aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Rehabilitasi, Narkoba

ABSTRACT

The research objectives in this study are to identify and analyze the enforcement of rehabilitation sanctions for narcotics users at the Central Java Police and knowing and analyzing the obstacles in law enforcement of rehabilitation sanctions against narcotics users in the Central Java Police.

This study uses a sociological juridical approach, which in this case relates to the enforcement of rehabilitation sanctions for narcotics users at the Central Java Regional Police with descriptive analytical research specifications. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using the theory of justice and the theory of expediency.

The results of the study conclude that when the policw conduct an investigation and looks at the criminal provisions of Article 127 paragraphs (2) and (3), it can required to pay attention to the articles that regulate rehabilitation provisions so that later addicts and victims Narcotics abusers can be rehabilitated both medical rehabilitation and social rehabilitation and are no longer sentenced to imprisonment or confinement because the rehabilitation is counted as a period of serving a sentence. It is stated that there are 5 (five) obstacles, namely: a) There has not been a special place for addicts and victims of narcotics abusers to rehabilitate, b) The problem of rehabilitation costs for convicts of narcotics abuse cases, c) There is no rehabilitation center appointed by the government, d) There was a difference in information between the defendant, the witness and the results of the criminalistic laboratory, e) An execution problem occurred. The solutions to the existing obstacles are: a) Provision of special places for addicts and victims of narcotics abuse to rehabilitate, b) Providing subsidies to reduce rehabilitation costs for convicts of narcotics abuse cases, c) Facilitating narcotics users to rehabilitate in rehabilitation homes, d) Increasing resources for law enforcement officers in the process of resolving drug abuse.

Keywords: *Law enforcement, Rehabilitation, Narcotics*